

**ANALISIS MODEL ANALISA STANDAR BELANJA
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

**Maria Fithri Agustina
Irwan Taufiq Ritonga, S. E., M. Bus., Ph. D., CA**

ABSTRACT

Analisa Standar Belanja (ASB) menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan suatu instrumen dalam perencanaan dan penganggaran yang harus disusun berdasarkan kaidah standar. Standar adalah instrument yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang.

Pemerintah Daerah DIY merupakan pionir diantara pemerintah daerah yang telah menyusun ASB pada level program. Penyusunan ASB pada level program menimbulkan permasalahan krusial terhadap fungsi ASB sebagai instrumen standar. ASB dalam kaidah standar seharusnya dapat memberikan perlakuan yang sama atas aktivitas/proses bisnis yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain model (ASB) di Pemerintah Daerah DIY yang lebih sesuai dengan konsep hubungan kewajaran beban kerja dan belanja. Penelitian ini dilaksanakan berdasar metode penelitian dan pengembangan (*research and development*).

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, *focus group discussion* dan studi dokumentasi. Wawancara dan *focus group discussion* melibatkan tim penyusun ASB Pemerintah Daerah DIY dan beberapa sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan bahwa, ASB seharusnya disusun pada level sub proses kegiatan. Berdasarkan karakteristik program, kegiatan dan sub proses kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah DIY, level sub proses kegiatan memiliki karakteristik identik atau keimiripan proses bisnis diantara OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyusun 5 model ASB pada level sub proses kegiatan. Kelima model ASB tersebut adalah ASB Sosialisasi ASN, ASB Sosialisasi Masyarakat, ASB *Focus Group Discussion*, ASB *Workshop* dan ASB Rapat Kerja. Model ASB disusun menggunakan analisis *enjineering* dan analisis konten. Masing-masing model ASB diidentifikasi berdasar definisi operasional, pengendali belanja, rentang relevan dan *structure cost*. *Structure cost* terdiri dari aktivitas/proses bisnis, komponen belanja, volume belanja dan perilaku belanja.

Akhirnya penelitian ini mensimulasikan perhitungan kelima model ASB yang telah disusun. Simulasi tersebut menunjukkan nilai rentang kewajaran belanja, nilai belanja kegiatan per peserta/orang dan proporsi perbandingan nilai belanja per aktivitas terhadap total belanja.

KATA KUNCI

Analisa Standar Belanja, Model ASB, analisis enjineering, analisis konten, perilaku belanja, perencanaan dan penganggaran

Pendahuluan

Perkembangan penyusunan ASB di Pemerintah Daerah DIY mengalami tiga tahap dinamika konsep/model ASB. Pemerintah Daerah DIY mengawali dengan menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 39 Tahun 2005 tentang Standar Analisa Belanja (SAB) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Pemerintah Daerah DIY menyusun ASB dengan konsep yang berbeda pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. ASB ditetapkan sebagai besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses dan sub proses kegiatan penghitungan kebutuhan belanja kegiatan. Kemudian ASB mengalami perubahan yang mendasar pada tahun 2016. Perubahan ini sebagai sebuah bentuk respon atas kebijakan *money follows program*. ASB berbasis program Pemerintah Daerah DIY dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY No. 65 Tahun 2016 tentang ASB, yang terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur DIY No. 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja.

Model ASB Pemerintah Daerah DIY adalah ASB berbasis program. ASB berbasis program tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan ditengarai disebabkan oleh penetapan beban kerja pada level program, sehingga terlalu luas dan mempengaruhi besaran belanja pada kegiatan yang memiliki proses bisnis yang sama. Apabila Pemerintah Daerah DIY merumuskan ASB berdasarkan program, hal ini menyebabkan model ASB terlalu luas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh program lain (Febrianto dalam Iskandar, 2018).

Permasalahan dalam model ASB berbasis program di Pemerintah Daerah DIY adalah desain/model ASB tidak sesuai dengan konsep hubungan kewajaran beban kerja dan belanja. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain model ASB di Pemerintah Daerah DIY yang lebih sesuai dengan konsep hubungan kewajaran beban kerja dan belanja. Penelitian ini berfokus pada format ASB yang ada di Pemerintah Daerah DIY, memastikan hubungan kegiatan dengan aktivitas dan beban kerja yang sama seharusnya mendapatkan total biaya/belanja yang sama.

Tinjauan Pustaka

Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya/belanja setiap kegiatan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui kegiatan. Kewajaran beban kerja dilihat berdasarkan : 1) kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan oleh OPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), 2) kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan, serta 3) kapasitas OPD untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut dengan tingkat capaian yang diinginkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran biaya/belanja berdasarkan 1) kaitan antara biaya/belanja yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja, 2) kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku, 3) kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rerpublik Indonesia (dalam Modul Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Eksekutif, 2015)).

Pola Perilaku Belanja

Perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah (misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja tetap, belanja variabel dan belanja semi variabel. Penjelasan ketiga jenis pola perilaku belanja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja tetap adalah belanja yang totalnya tetap di dalam rentang kapasitas (*range of capacity*) tertentu, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah. Sejauh tidak melampaui rentang kapasitas, total belanja tetap tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja.
2. Belanja Variabel adalah belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja.
3. Belanja semi variabel adalah belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkatan perubahan konstan.

Desain ASB Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2011 hingga saat ini tidak mendefinisikan pola perilaku belanja. ASB Pemerintah Daerah DIY hanya memberikan batasan volume belanja untuk setiap proses kegiatan.

Metoda Penentuan Pola Perilaku Belanja

Menurut Ritonga (2010), tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja secara umum adalah:

- a. pendekatan intuisi, merupakan pendekatan yang didasarkan intuisi pembuat keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya;
- b. pendekatan analisis *enjinering*, merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Contohnya, jika pemerintah daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis maka diketahui bahwa akan memerlukan lima orang panitia, dua buah komputer, sepuluh rim kertas, dan lain sebagainya. Pendekatan ini memang teliti, namun seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi;
- c. pendekatan analisis data belanja masa lalu, merupakan pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa datang sama perilakunya dengan belanja masa yang lalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing belanja.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian dan pengembangan (*research and development*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan rancangan produk baru, menguji keefektifan produk yang telah ada serta mengembangkan dan menciptakan produk baru

Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan metoda *non probability sampling* dan dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan sampel akan mengambil kegiatan yang umum dilakukan oleh OPD yang memiliki bisnis proses yang sama karena mengingat keterbatasan waktu dan keluasaan topik penelitian.

Secara ringkas penyandingan antara teknik analisa data dan kegiatan yang akan dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses Analisa Data	Kegiatan yang dilakukan	Output	Teknik Penelitian
Potensi dan Masalah	1. Identifikasi masalah ASB berbasis <i>money follows program</i>	Daftar ASB yang bermasalah	Analisis konten dokumen Pergub No. 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja
Studi Literatur	2. Studi literatur	1. Gap Defnisi 2. Inkonsistensi 3. Karakteristik kegiatan dan sub proses kegiatan	1. Studi dokumen 2. Wawancara
Pengumpulan Informasi	3. Pemilihan kegiatan sebagai sampel ASB	1. Hasil wawancara tentang definisi ASB; 2. Hasil wawancara tentang ASB belum ideal; 3. Hasil wawancara tentang ASB yang ideal; 4. Daftar sub kegiatan yang dipilih menjadi sampel ASB	
Desain Produk	4. Mendesain Model	1. Membuat definisi operasional; 2. Penentuan rentang relevansi 3. Penentuan proses bisnis (aktivitas) kegiatan; 4. Penentuan komponen belanja dan volume belanja	1. Focus Group Discussion (FGD); 2. Wawancara 3. Analisis Konten
Validasi Desain	5. Validasi asar	Pernyataan dan atau saran bahwa model ASB siap diimplementasikan	Wawancara
Desain Teruji	6. Mensimulasikan Model ASB	Simulasi ASB	Penghitungan nilai ASB

Gambar 1 Alur Kegiatan Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini,

metode validitas data yang digunakan adalah triangulasi.

1. Triangulasi Metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.
2. Triangulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber data yang diperoleh. Misalnya, hasil wawancara dengan antar responden, hasil dokumentasi

Pembahasan

Penelitian ini dibahas berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam proses analisa data. Pembahasan hasil penelitian ini menghasilkan output dari kegiatan proses analisa data yang menjawab tujuan penelitian.

Identifikasi Masalah

Desain/model ASB berbasis program Pemerintah Daerah DIY sebagaimana tertuang dalam Pergub DIY No. 71 Tahun 2017 merupakan bentuk inovasi Pemerintah Daerah DIY dalam menindaklanjuti kebijakan perencanaan *money follows program*. Sebagai sebuah terobosan/inovasi, desain ASB berbasis program pemerintah Daerah DIY layak mendapatkan apresiasi. Apresiasi terhadap desain ASB berbasis program Pemerintah Daerah DIY dapat dilihat dari adanya potensi kemanfaatan secara umum maupun khusus.

ASB berbasis program tidak terlepas dari masalah. Masalah yang timbul dari desain ASB tersebut adalah tidak ada perlakuan/batasan belanja yang sama pada sub proses yang memiliki keidentikan proses bisnis. Desain ASB masih menunjukkan varian belanja dan

batasan belanja pada proses bisnis yang identik, Identifikasi potensi dan masalah ASB berbasis program adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi Potensi dan Masalah

Potensi	Masalah
1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja.	1) Tidak dapat memberikan perlakuan/batasan belanja yang sama pada jenis sub proses kegiatan yang memiliki proses bisnis yang sama.
2) Belanja daerah dapat lebih efektif mendukung program prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD yang telah ditetapkan.	2) Terdapat banyak varian belanja dan batasan belanja pada sub proses kegiatan yang memiliki proses bisnis yang sama.
	3) Tidak adanya definisi operasional yang dapat dipahami oleh OPD untuk setiap sub proses kegiatan

Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dalam rangka mencari rujukan teori maupun regulasi yang tepat atas interpretasi ASB. Selain itu juga dilakukan telaah atas desain ASB Pemerintah Daerah DIY. Pada tahap ini, peneliti melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dilakukan dengan pengumpulan dokumen, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Gubernur DIY No. 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja;
5. RPJMD DIY.

Dokumen-dokumen di atas merupakan dokumen-dokumen yang tepat untuk menginterpretasikan ASB. Setelah dilakukan studi literatur atas dokumen-dokumen di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

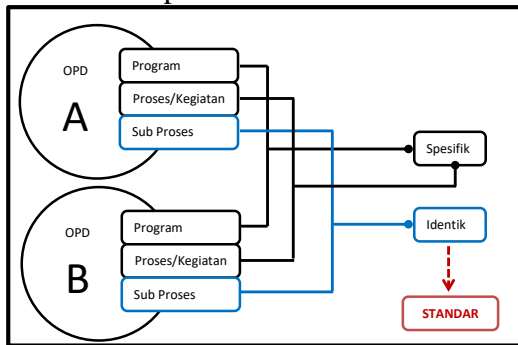
Gap definisi ASB

Penyusunan ASB telah diamanatkan dalam berbagai regulasi salah satunya didasarkan pada penjelasan pasal 39 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis Standar Belanja didefinisikan sebagai penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 298 mengamanatkan bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Definisi ASB Pemerintah Daerah DIY sebagaimana tercantum dalam Pergub No. 71 Tahun 2017 adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses dan sub proses pencapaian sasaran program masing-masing OPD sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dari gap definisi tersebut dapat dilihat bahwa basis model ASB sesuai amanat regulasi adalah ASB kegiatan, sedangkan basis model ASB Pemerintah Daerah DIY adalah ASB program.

Karakteristik program, kegiatan dan sub proses kegiatan

Hasil wawancara dan studi dokumen menyimpulkan bahwa ASB seharusnya disusun pada level sub proses kegiatan. Karakteristik sub proses kegiatan adalah adanya keidentikan proses bisnis antar OPD.



Gambar 2. Karakteristik program, kegiatan dan sub proses kegiatan

Hasil wawancara dan Focus Group Discussion memutuskan 5 sampel sub kegiatan sebagai sampel dalam penelitian adalah:

Tabel 2 Pemilihan Kegiatan Sebagai Sampel

NO	Sub proses kegiatan	Output
1	Sosialisasi ASN	Jumlah ASN yang disosialisasi
2	Sosialisasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang disosialisasi
3	FGD	Jumlah peserta FGD
4	Workshop	Jumlah peserta workshop
5	Rapat Kerja	Jumlah peserta rapat kerja

Pengembangan desain model Analisa Standar Belanja yang dihasilkan dari penelitian ini agar dapat diterapkan di lapangan dan hasilnya valid, perlu dilakukan validasi dari pengguna. Pengguna yang dilibatkan untuk memberikan saran, kritik dan opini atas pengembangan model ASB dalam penelitian. Hasil Penelitian dan validasi pengguna menghasilkan 5 model ASB yang telah disumulasikan sebagai berikut.

ASB Sosialisasi ASN

Nama ASB : ASB Sosialisasi bagi ASN
 Definisi Operasional : Merupakan kegiatan untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan** dan lainnya kepada **pegawai** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja : Jumlah ASN
 Pengendali Belanja Tetap : Belanja rapat persiapan (aktivitas persiapan) Belanja rapat evaluasi (aktivitas pelaporan)

Pengendali Belanja Variabel : Selain belanja tetap dapat disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan Sosialisasi (dalam angkatan)

Rentang Relevan : Jumlah peserta sosialisasi antara 30 sampai 50 orang
 Jumlah hari sosialisasi 1 hari

Rentang Kewajaran Belanja : Rp27.880.000,- sampai dengan Rp31.260.000,-

Simulasi	Total Belanja	Belanja kegiatan/orang
Minimal	Rp27.880.000,-	Rp929.333,33
Maksimal	Rp31.260.000,-	Rp625.200,-

Aktivitas	Komponen Belanja	Volume Belanja	Perilaku Belanja
Persiapan	ATK	Paket ≤ 50 Orang	Variabel
	Penggandaan	5.000 lembar	Variabel
	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap
Pelaksanaan	Honor narasumber/pembicara	4 os x 1 hari	Variabel
	Honor Peserta	(30 s.d 50) orang x 1 hari	Variabel
	Penggandaan materi	10 lembar x jumlah pemateri x jumlah peserta	Variabel
	Makan minum harian umum di gedung pemerintah	Jumlah (peserta+ narasumber + penyelenggara (10% dari peserta)) x 1 hari	Variabel
	Perjalanan dinas narasumber pusat	Jumlah narasumber pusat	Variabel
	Cetak	jumlah peserta + jml narasumber+jumlah penyelenggara	Variabel
Pelaporan	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Variabel

ASB Sosialisasi Masyarakat

Nama ASB : ASB Sosialisasi Masyarakat
 Definisi Operasional : Merupakan kegiatan untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan** dan lainnya kepada **non pegawai** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali Belanja : Jumlah peserta
 Pengendali Belanja Tetap : Belanja rapat persiapan (aktivitas persiapan) Belanja rapat evaluasi (aktivitas pelaporan)

Pengendali Belanja Variabel : Selain belanja tetap dapat disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan Sosialisasi (dalam angkatan)

Rentang Relevan : Jumlah peserta sosialisasi antara 50 sampai 100 orang
Jumlah hari sosialisasi 1 hari

Rentang Kewajaran Belanja : Rp36.328.000,- sampai dengan Rp43.864.000,-

Simulasi	Total Belanja	Belanja kegiatan/orang
Minimal	Rp36.328.000,-	Rp605.466,67
Maksimal	Rp43.864.000,-	Rp438.640,00

Aktivitas	Komponen Belanja	Volume Belanja	Perilaku Belanja	
Persiapan	ATK	Paket > 50 Orang	Variabel	
	Penggandaan	5.200 lembar	Variabel	
	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap	
	Perjalanan dinas dalam daerah	2 orang x 1 hari	Variabel	
Pelaksanaan	Honor narasumber/pembicara	4 os x 1 hari	Variabel	
	Honor peserta	(50 s.d 80) orang x 1 hari	Variabel	
	Penggandaan materi Sosialisasi	10 lembar x jumlah pemateri x jml peserta	Variabel	
	Makan minum harian umum di gedung pemerintah	Jumlah (peserta+ narasumber + penyelenggara (10% dari peserta)) x 1 hari	Variabel	
	Sewa tempat pertemuan	1 hari	Variabel	
	Sewa perlengkapan - Sewa meja	jml (peserta + penyelenggara + narasumber) x 1 hari	Variabel	
	- Sewa kursi	jml (peserta + penyelenggara + narasumber) x 1 hari	Variabel	
	- Sewa LCD	2 unit x 1 hari	Variabel	
	- Sewa sound system	1 unit x 1 hari	Variabel	
	Perjalanan dinas narasumber pusat	Jumlah narasumber pusat	Variabel	
	Perjalanan dinas dalam daerah	(jumlah penyelenggara + pemateri) x 1 hari	Variabel	
	Cetak	jumlah peserta + jml narasumber+ jumlah penyelenggara	Variabel	
	Pelaporan	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap

ASB Focus Group Discussion

Nama ASB : Focus Group Discussion (FGD)

Definisi Operasional : Merupakan kegiatan **diskusi** yang diselenggarakan **secara sistematis dan terarah** mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu yang **dikhususkan bagi perumus kebijakan strategis (Fungsi Kesekretariatan dan Badan)**

Pengendali Belanja : Jumlah peserta

Pengendali Belanja Tetap : Belanja rapat persiapan (aktivitas persiapan)
Belanja rapat evaluasi (aktivitas pelaporan)

Pengendali Belanja Variabel : Selain belanja tetap dapat disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan FGD (dalam angkatan)

Rentang Relevan : Jumlah Peserta FGD antara 30 sampai 50 orang
Jumlah hari FGD 1 hari

Rentang Kewajaran Belanja : Rp28.470.000 sampai dengan Rp31.850.000,-

Simulasi	Total Belanja	Belanja kegiatan/orang
Minimal	Rp28.470.000	Rp605.466,67
Maksimal	Rp31.850.000,-	Rp438.640,00

Aktivitas	Komponen Belanja	Volume Belanja	Perilaku Belanja	
Persiapan	ATK	Paket ≤ 50 orang	Variabel	
	Penggandaan	5.000 lembar	Variabel	
	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap	
Pelaksanaan	Honor narasumber/pembicara	4 os x 1 hari	Variabel	
	Honor moderator	4 os x 1 hari	Variabel	
	Honor Peserta	(30 s.d 50) orang x 1 hari	Variabel	
	Penggandaan materi	10 lembar x jml peserta x jml pemateri	Variabel	
	Makan minum harian umum di gedung pemerintah	Jumlah (peserta+ narasumber + moderator + penyelenggara (10% dari peserta)) x 1 hari	Variabel	
	Perjalanan Dinas Narasumber pusat	Jumlah narasumber pusat	Variabel	
	Cetak	jumlah peserta + jml narasumber + moderator + jumlah penyelenggara	Variabel	
	Pelaporan	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap

ASB Workshop

Nama ASB : *Workshop*
 Definisi Operasional : Merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk **membekali para peserta dengan kemampuan** yang diharapkan sekaligus juga **menghasilkan sesuatu** karya yang berkaitan dengan kebijakan terapan (Dinas)

Pengendali Belanja : Jumlah peserta
 Pengendali Belanja Tetap : Belanja rapat persiapan (aktivitas persiapan)
 Belanja rapat evaluasi (aktivitas pelaporan)
 Pengendali Belanja Variabel : Selain Belanja Tetap dapat disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan *Workshop* (dalam angkatan)

Rentang Relevan : Jumlah Peserta *Workshop* antara 40 sampai 60 orang
 Jumlah hari *Workshop* 1 hari
 Rentang Kewajaran Belanja : Rp26.0320.000,- sampai dengan Rp29.746.000,-

Rentang Kewajaran Belanja :

Simulasi	Total Belanja	Belanja kegiatan/orang
Minimal	Rp26.0320.000,-	Rp650.800,-
Maksimal	Rp29.746.000,-	Rp495.766,67

Aktivitas	Komponen Belanja	Volume Belanja	Perilaku Belanja
Persiapan	ATK	Peserta ≤ 50 disetarakan Paket ≤ 50 Orang Peserta > 50 disetarakan Paket > 50 orang	Variabel
	Penggandaan	Peserta ≤ 50 disetarakan 5.000 lembar Peserta > 50 disetarakan 5.200 lembar	Variabel
	Perjalanan dinas dalam daerah persiapan	2 orang x 2 kali	Variabel
	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap
Pelaksanaan	Honor narasumber/pembicara	*Maksimal 3 os x 1 hr	Variabel
	Honor instruktur	*Maksimal 6 jpl **	Variabel
	Honor peserta	(40 s.d 60) orang x 1 hari	Variabel
	Penggandaan materi	10 lembar x jml peserta x jml pemateri	Variabel
	Makan minum harian umum di gedung pemerintah	Jumlah (peserta+ narasumber+ instruktur + penyelenggara (10% dari peserta)) x 1 hari	Variabel
	Sewa tempat pertemuan	1 hari	Variabel
	Sewa perlengkapan - Sewa meja	jml (peserta + penyelenggara +	Variabel

Aktivitas	Komponen Belanja	Volume Belanja	Perilaku Belanja
		narasumber+ instruktur) x 1 hari	
	- Sewa kursi	jml (peserta + penyelenggara + narasumber+ instruktur) x 1 hari	Variabel
	- Sewa LCD	2 unit x 1 hari	Variabel
	- Sewa sound system	1 unit x 1 hari	Variabel
	Perjalanan Dinas Narasumber pusat	Jumlah narasumber pusat	Variabel
	Perjalanan dinas dalam daerah	(jumlah penyelenggara +pemateri) x 1 hari	Variabel
	Cetak	jumlah peserta + jml narasumber + jml instruktur + 15 penyelenggara	Variabel
Pelaporan	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap

Catatan:

* Jumlah jam narasumber dan instruktur maksimal 8 jpl

** Perbandingan jumlah instruktur dan peserta 1 : 10

ASB Rapat Kerja

Nama ASB : Rapat Kerja
 Definisi Operasional : Merupakan **sidang** untuk **membahas masalah** dan menyelesaikan berkenaan dengan **bidang pekerjaan yang dihadapi**

Pengendali Belanja : Jumlah peserta
 Pengendali Belanja Tetap : Belanja rapat persiapan (aktivitas persiapan)
 Belanja rapat evaluasi (aktivitas pelaporan)
 Pengendali Belanja Variabel : Selain belanja tetap dapat disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan rapat kerja (dalam angkatan)

Rentang Relevan : Jumlah peserta rapat kerja antara 40 sampai 60 orang
 Jumlah hari rapat kerja 1 hari sampai dengan 3 hari
 Rentang Kewajaran Belanja : Rp30.160.000,- sampai dengan Rp80.740.000,-

Rentang Kewajaran Belanja :

Simulasi	Total Belanja	Belanja kegiatan/orang
Minimal	Rp1.345.666,67	Rp1.345.666,67
Maksimal	Rp754.000,-	Rp754.000,-

Aktivitas	Komponen Belanja	Volume Belanja	Perilaku Belanja
Persiapan	ATK	Peserta ≤ 50 disetarakan Paket ≤ 50 Orang Peserta > 50 disetarakan Paket > 50 Orang	Variabel

Aktivitas	Komponen Belanja	Volume Belanja	Perilaku Belanja
	Penggandaan	Peserta ≤ 50 disetarakan 5.000 lembar Peserta > 50 disetarakan 5.200 lembar	Variabel
	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap
Pelaksanaan	Honor narasumber/ pembicara	4 os x hari pelaksanaan	Variabel
	Honor moderator	4 os x hari pelaksanaan	Variabel
	Honor peserta	(40 s/d 60) orang x hari pelaksanaan	Variabel
	Penggandaan materi	10 lembar x jml peserta x jml pemateri	Variabel
	Makan dan minum pertemuan di hotel **	Jumlah (peserta+ narasumber+ moderator+ penyelenggara (10% dari peserta)) x 1 hari	Variabel
	Perjalanan Dinas Narasumber pusat	Jumlah narasumber pusat	Variabel
	Cetak	jumlah peserta + jml narasumber + moderator + jumlah penyelenggara	Variabel
Pelaporan	Makan minum rapat	25 orang x 2 kali	Tetap

Keterbatasan Penelitian

1. Pada awalnya, penelitian ini bertujuan untuk menyusun model ASB yang lebih ideal melalui proses pembahasan FGD. Proses FGD diharapkan dapat mempertemukan berbagai saran dan masukan dari tim perumus ASB maupun dari *pengguna* ASB yang menjadi sampel. Namun demikian, ternyata pada tahap pelaksanaan FGD terjadi kendala dengan ketidakhadiran beberapa tim perumus ASB dan *pengguna* ASB. Selain itu, proses FGD juga cukup larut dalam pemahaman tentang karakter program, kegiatan, dan sub proses kegiatan yang khusus pada perencanaan Pemerintah Daerah DIY. Dengan demikian

penyusunan ASB dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mempertimbangkan triangulasi sumber dari Pergub No. 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja, Pergub No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Belanja, dan beberapa sumber wawancara;

2. Penelitian ini belum dapat mengidentifikasi perilaku belanja semi variabel.

Simpulan dan Rekomendasi

Hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisa Standar Belanja sebagai suatu instrumen dalam perencanaan dan penganggaran harus disusun berdasarkan kaidah standar. Standar adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang;
2. Berdasarkan karakteristik Program, Kegiatan dan Sub Proses Kegiatan Pemerintah Daerah DIY, standar sebaiknya disusun pada level sub proses kegiatan;
3. Sub proses kegiatan memiliki karakteristik identik di hampir semua OPD Pemerintah Daerah DIY.

Berdasarkan pada simpulan di atas, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah DIY
 - a. Sebagai suatu bentuk inovasi kebijakan, ASB berbasis program Pemerintah Daerah DIY masih perlu pembenahan. Pembenahan yang paling krusial adalah menelaah

- kembali keberlakuan standar untuk sub proses kegiatan yang memiliki bisnis proses yang sama di setiap OPD.
- b. Agar terdapat keberlakuan yang sama, setiap bisnis proses yang memiliki beban kerja yang sama seharusnya mendapatkan batasan belanja yang sama.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Perlu dikaji penyusunan ASB yang bersifat teknis. ASB yang bersifat teknis seharusnya mampu menterjemahkan kebutuhan belanja-belanja khusus seperti belanja bahan percontohan.
 - b. Perlu dikaji belanja yang dapat dikategorikan sebagai belanja semi variabel. Kajian terhadap belanja semi variabel diharapkan dapat memberikan tambahan *value for money* atas manfaat ASB.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Modul Pelatihan Pengelolaan Keuangan *Daerah Tingkat Eksekutif*, 2015, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Febrianto, Andrie Mulya. 2018. Wawancara oleh Haris Iskandar. Selasa 24 April 2018. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, Haris. 2018. Laporan Perjalanan Dinas. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., 2014. Analisis Data Kualitatif (terjemahan), Cetakan 1. Ed. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017. Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, No. 73. Biro Hukum. Yogyakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 140. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018, Berita Negara RI Tahun 2017, No. 916. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (*Mixed Methods*) Cetakan ke-8. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2017. Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development, Cetakan ke-8. Bandung: Alfabeta.
- Yin, Robert. K. 2014. *Case Study Research Design and Methods, Fifth Edition* Thousand Oaks, CA: Sage.